



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 12888-12899

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali

Ni Nyoman Ayu Purnama Sari<sup>1</sup>, I Ketut Yudana Adi<sup>2</sup>, Komang Fridagustina Adnantara<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Akuntansi, Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan, Universitas Triatma Mulya

[avuupurnama080@gmail.com](mailto:avuupurnama080@gmail.com)

### Abstrak

*Kinerja keuangan sangat penting dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara efektif, efisien, dan transparan. Melalui kinerja keuangan, dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan, mengelola belanja, serta mencapai tujuan pembangunan daerah. Namun di Kabupaten/Kota Provinsi Bali fenomena menunjukkan adanya dinamika fluktuatif pada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal, yang berimplikasi terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah, dana perimbangan merupakan sumber utama penerimaan daerah yang menentukan kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan. Sementara itu, belanja modal berkaitan langsung dengan pengeluaran untuk investasi aset dan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik. Oleh karena itu, perubahan atau fluktuasi pada komponen-komponen tersebut akan mempengaruhi tingkat efektivitas, efisiensi, serta kemampuan keuangan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data dokumentasi atau arsip yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 8 kabupaten dan 1 kota yang berada di Provinsi Bali. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.*

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan.

### 1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan salah satu upaya guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini pemerintah pusat tidak dapat mengawasi pembangunan daerah secara menyeluruh sehingga kewenangannya dilimpahkan terhadap pemerintah daerah untuk mengurus sendiri kepentingan-kepentingan daerahnya (Nasution, 2020). Maka dari itu perlu diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom guna mengatur dan melaksanakan sendiri urusan pemerintahan dan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Supaya proses pembangunan daerah dapat segera dilaksanakan tanpa menunggu pendanaan dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah perlu mengelola keuangan daerah secara mandiri (Yoga, 2021).

Kuangan daerah yang dapat dikelola dengan baik mencerminkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerahnya baik pula. Pengelolaan keuangan daerah tertentu dapat tercermin dari Anggaran Pendapatan, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat digunakan untuk menciptakan peraturan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah. Menurut Hasna (2019) dalam (Yoga, 2021) sumber keuangan daerah ada 2 jenis, yaitu sumber keuangan daerah yang berasal dari penerimaan daerah yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundangan dan sumber keuangan daerah yang berasal dari upaya-upaya tertentu yang dilakukan oleh pemerintah yang hasilnya akan didapat beberapa tahun kemudian. Upaya tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur yang diindikasikan sebagai salah satu kegiatan belanja modal. Salah satu masalah keuangan daerah yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia adalah ketergantungannya pemerintah daerah

kepada pemerintah pusat dan daerah tersebut kurang mampu dalam menggali sumber-sumber pendapatan potensial (Siddiq, 2022). Sumber pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan asli daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Sumber pendapatan asli daerah bisa berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah (Muslimin, 2022). Maka dari itu pemerintah daerah harus mengupayakan kenaikan pendapatan dari daerah setempat agar dapat memperbesar keuangan daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah yang semakin bertambah dapat mengindikasikan kinerja keuangan yang baik.

Selain itu, pendapatan bisa menjadi dana yang dibutuhkan oleh pemerintah guna membiayai kegiatannya.

**Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2019-2024 Dalam Rupiah (000)**

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	133.698.784	148.045.103	185.004.035	175.992.613	221.557.666	184.580.000
Tabanan	354.558.239	313.042.530	362.314.631	436.408.393	425.344.000	549.028.490
Badung	4.835.188.460	2.116.974.302	1.750.345.226	3.705.745.447	6.309.336.710	7.506.824.346
Gianyar	997.478.368	545.869.873	430.172.109	857.553.633	1.479.338.179	1.686.689.061
Klungkung	225.063.772	220.893.875	254.494.496	309.462.548	419.844.707	421.887.362
Bangli	127.040.436	104.325.150	163.537.096	144.005.843	205.706.000	268.536.208
Karangasem	233.013.033	219.176.733	252.688.747	301.322.231	381.240.518	416.420.000
Buleleng	365.595.301	318.986.891	391.988.445	410.564.892	460.500.058	509.474.781
Denpasar	1.010.779.481	731.261.281	792.362.414	888.051.856	920.184.382	1.351.387.264

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2025

Berdasarkan tabel 1 realisasi pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2019 hingga 2024 dalam tabel menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2019–2024. Kabupaten Badung terlihat sebagai daerah dengan pendapatan asli daerah tertinggi setiap tahunnya, meskipun sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 dan 2021, kemudian kembali meningkat pesat hingga mencapai lebih dari 7,5 triliun pada tahun 2024. Kabupaten/kota lain seperti Denpasar, Gianyar, dan Tabanan juga menunjukkan pola kenaikan pendapatan asli daerah yang relatif stabil setelah melewati masa penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi. Sementara itu, daerah seperti Jembrana, Bangli, dan Karangasem terlihat mengalami peningkatan pendapatan asli daerah secara bertahap dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah terus membaik setelah masa pemulihan ekonomi, meskipun besaran kontribusinya berbeda-beda antar wilayah sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing.

Selain pendapatan asli daerah adapun faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus (Karso, 202). Dana perimbangan memiliki peran penting dalam memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Melalui mekanisme dana perimbangan, pemerintah pusat berupaya menyeimbangkan kemampuan fiskal antar daerah agar seluruh daerah mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal. Semakin besar dana perimbangan yang diterima suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut dalam membiayai kebutuhan pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, peningkatan dana perimbangan akan berdampak positif terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah, karena menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

**Tabel 2. Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2019-2024 Dalam Rupiah (000)**

Kabupaten/Kota	Dana Perimbangan					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	707.790.157	908.105.548	841.856.179	919.698.953	661.274.247	735.266.716
Tabanan	1.075.691.158	1.420.475.257	1.371.746.823	1.347.825.808	1.013.203.900	1.093.989.893
Badung	568.230.993	875.264.611	1.075.222.607	898.419.919	591.293.650	642.418.925
Gianyar	940.139.489	1.140.696.384	1.069.631.880	1.234.601.963	803.857.961	918.012.008
Klungkung	692.588.596	849.181.823	853.102.994	838.345.455	811.310.000	850.737.796
Bangli	717.603.942	737.870.240	949.349.147	960.732.039	763.325.937	1.103.065.395
Karangasem	1.011.875.538	1.118.137.004	1.218.932.970	1.251.259.825	964.079.478	1.091.467.599
Buleleng	1.331.020.352	1.573.171.787	1.574.989.396	1.645.523.802	1.269.014.740	1.244.316.529
Denpasar	869.958.858	964.680.368	862.735.023	1.202.729.157	990.000.000	1.168.960.000

Sumber: DJPK Kemenkeu (2025)

Berdasarkan tabel 2 menjelaskan dana perimbangan pada kabupaten/kota yang ditampilkan dalam tabel menunjukkan dinamika yang beragam sepanjang periode 2019–2024. Secara umum, sebagian besar daerah mengalami peningkatan dana perimbangan pada tahun 2020, kemudian fluktuatif pada tahun-tahun berikutnya. Kabupaten seperti Tabanan, Buleleng, dan Gianyar tampak memperoleh dana perimbangan yang relatif tinggi dan stabil, meskipun sempat menurun pada tahun 2023. Sementara itu, daerah seperti Badung dan Jembrana terlihat mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2023 sebelum kembali meningkat pada 2024. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan bahwa alokasi dana perimbangan kepada masing-masing daerah dipengaruhi oleh kondisi fiskal nasional serta kebutuhan daerah, sehingga nilai yang diterima dapat berubah tiap tahun sesuai prioritas pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat.

Meskipun dana perimbangan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaannya. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang menyebabkan rendahnya kemandirian fiskal daerah. Kondisi ini membuat kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli menjadi terbatas. Selain itu, ketidaktepatan waktu penyaluran dan ketidaksesuaian alokasi Dana Perimbangan dengan kebutuhan riil daerah sering kali menghambat pelaksanaan program Pembangunan. Efektivitas penggunaan dana perimbangan juga menjadi kendala, karena sebagian daerah belum mampu mengelola anggaran secara optimal untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Strategi dalam pengelolaan dana perimbangan yang lebih efisien dan akuntabel agar dana tersebut benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah.

Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan adapun faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi (Magfira, 2022). Belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena berhubungan langsung dengan peningkatan aset dan kapasitas pelayanan publik. Melalui belanja modal, pemerintah daerah melakukan investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan, serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Peningkatan belanja modal yang dikelola secara efektif akan mencerminkan kemampuan daerah dalam mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan jangka panjang, sehingga berdampak positif terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya, jika belanja modal tidak diimbangi dengan perencanaan dan pengawasan yang baik, maka efektivitas penggunaan anggaran menjadi rendah dan tidak memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja modal menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Tabel 3. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2024 Dalam Rupiah (000)**

Kabupaten/Kota	Belanja Modal					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	218.395.139	83.291.080	85.046.360	128.377.652	920.845.755	979.291.842
Tabanan	187.182.375	184.671.273	310.954.822	146.740.173	252.221.889	311.088.827
Badung	824.668.016	452.909.485	100.428.626	476.196.285	520.100.000	2.108.154.868
Gianyar	250.352.441	416.037.115	490.427.419	398.529.833	301.739.414	321.107.036
Klungkung	129.434.103	116.438.069	86.144.471	130.873.281	555.576.265	117.112.000
Bangli	161.264.349	57.141.113	183.280.093	293.929.283	297.610.000	208.016.939
Karangasem	152.232.673	81.578.988	143.668.862	139.308.068	119.036.449	264.860.000
Buleleng	274.879.719	259.440.204	202.523.214	155.220.623	189.949.646	183.312.147
Denpasar	293.700.083	95.126.157	102.374.462	198.780.903	327.170.000	465.350.000

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2025

Belanja modal pada kabupaten/kota dalam tabel tersebut menunjukkan variasi yang cukup signifikan sepanjang periode 2019–2024. Kabupaten Badung terlihat memiliki belanja modal tertinggi pada beberapa tahun awal, khususnya tahun 2020, namun mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Sementara itu, kabupaten lain seperti Gianyar, Buleleng, dan Tabanan menunjukkan kecenderungan belanja modal yang relatif stabil dengan fluktuasi ringan dari tahun ke tahun. Beberapa daerah, seperti Jembrana dan Klungkung, tampak memiliki belanja modal dalam jumlah lebih kecil dibandingkan daerah lainnya, tetapi tetap menunjukkan pola peningkatan pada tahun-tahun tertentu. Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan bahwa belanja modal tiap daerah disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan fisik dan kemampuan anggaran daerah masing-masing, sehingga besaran alokasinya cenderung berbeda dan berubah mengikuti prioritas pembangunan setiap tahunnya.

Berdasarkan *research gap* penelitian sebelumnya dimana pada penelitian Putri (2024) dan Yoga (2021) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan karena semakin besar pendapatan asli daerah, semakin kuat kemampuan daerah dalam mengelola dan membiayai pembangunan secara mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Namun berbeda dengan penelitian Nofa (2023) menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan hal ini dikarenakan keuangan apabila peningkatan penerimaan tidak diikuti oleh efisiensi, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan Fadilatul (2024) dan Purba (2025) menyatakan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dikarenakan dana ini berperan penting dalam membantu pemerintah daerah membiayai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan adanya dana perimbangan, daerah memperoleh tambahan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dana perimbangan juga membantu mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, sehingga kinerja keuangan daerah dapat meningkat melalui peningkatan kemampuan dalam membiayai belanja modal, penyediaan infrastruktur, serta pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Namun berbeda dengan penelitian Rahmadina (2024) menyatakan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan hal ini dikarenakan apabila daerah menjadi terlalu bergantung pada dana tersebut tanpa berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dapat menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah, sehingga efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan menjadi kurang optimal. Selain itu, apabila penggunaan dana perimbangan tidak dikelola dengan baik—misalnya tidak tepat sasaran atau tidak mendukung kegiatan produktif—maka hal ini dapat menurunkan kualitas belanja daerah dan menghambat peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yoga (2021) dan Niswani (2024) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan hal ini dikarenakan apabila realisasi belanja tersebut tidak dikelola secara efisien dan tidak memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi daerah. Pengeluaran belanja modal yang besar tanpa perencanaan yang matang dapat menimbulkan pemborosan anggaran dan menurunkan efektivitas penggunaan dana publik. Selain itu, jika aset yang dibangun dari belanja modal tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah atau pelayanan publik, maka hal ini justru dapat membebani keuangan daerah melalui biaya pemeliharaan dan operasional yang tinggi. Akibatnya, kinerja keuangan daerah menjadi kurang optimal dan tingkat efisiensi fiskal menurun. Namun berbeda dengan Rahmadina (2024) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja dikarenakan apabila peningkatan belanja tersebut tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan daerah. Ketika pemerintah daerah mengalokasikan anggaran besar untuk belanja modal, tetapi hasilnya tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan atau tidak meningkatkan pelayanan publik, maka efisiensi keuangan menjadi menurun. Selain itu, pembiayaan belanja modal yang berlebihan dapat menyebabkan beban fiskal meningkat, terutama jika tidak didukung oleh kemampuan pendapatan daerah yang memadai. Akibatnya, kinerja keuangan daerah dapat melemah karena penggunaan dana tidak memberikan nilai tambah yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian berfokus pada “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2019-2024”.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali yang berfokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui situs resmi yang dapat diakses secara publik. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada ketersediaan data runtun waktu yang konsisten dan telah melalui proses validasi statistik, sehingga memiliki tingkat akurasi dan kredibilitas yang tinggi dalam menggambarkan kondisi keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen berupa kinerja keuangan daerah dan variabel independen yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal. Definisi operasional variabel mengacu pada indikator yang terukur secara numerik, seperti pajak daerah, retribusi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta komponen belanja modal dan rasio keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui beberapa rasio, antara lain rasio kemandirian, ketergantungan, derajat desentralisasi fiskal, efisiensi belanja, serta proporsi belanja modal terhadap total belanja.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencatat, mengutip, dan mengolah data dari laporan resmi, arsip, serta penelitian terdahulu yang relevan. Instrumen penelitian berupa data dokumentasi digunakan karena bersifat sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data yang dianalisis terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif, dengan sumber utama berupa data sekunder yang telah dipublikasikan secara resmi oleh instansi terkait.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bali, yaitu 8 kabupaten dan 1 kota, dengan teknik sampling jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian selama periode 2019–2024. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap kinerja keuangan daerah. Sebelum analisis, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan kelayakan model (Ghozali, 2018; 2020).

Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t), serta koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen (Sugiyono, 2017; Priyatno, 2018). Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel statistik, hasil regresi, serta grafik guna mempermudah interpretasi data dan penarikan kesimpulan penelitian.

## 3. Hasil dan Diskusi

### Metode Analisis Data

#### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menganalisis serta menilai apakah terdapat masalah dalam model linear dari asumsi klasik dan juga dilakukan untuk memenuhi syarat dalam suatu analisis. Menurut Ghozali (2020), uji asumsi klasik dapat dibagi menjadi 4 yaitu, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

### 1) Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi, variabel dependen maupun variabel independen mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* Hasil uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

			Unstandardized Residual
N			54
Normal	Mean		.0000000
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation		2.045701452
Most	Extreme	Absolute	.177
Differences		Positive	.177
		Negative	-.101
Test Statistic			1.300
Asymp. Sig. (2-tailed)			.068

Sumber: Data diolah SPSS, 2026

Berdasarkan tabel 4 hasil olah data uji normalitas pada tabel menunjukkan hasil analisis *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,068, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal, karena data yang berdistribusi normal apabila *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05

### 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah adanya hubungan linier atau korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya korelasi di antara variabel independen. Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Multikoleniaritas**

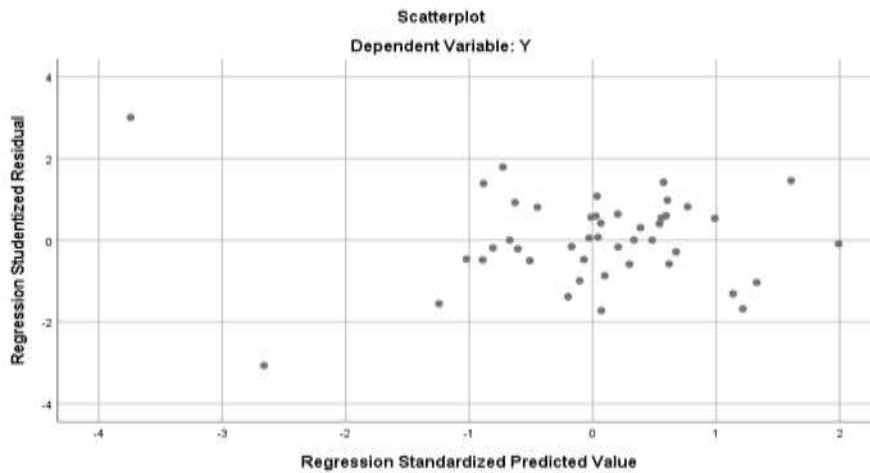
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X <sub>1</sub>	.719	1.391
X <sub>2</sub>	.941	1,062
X <sub>3</sub>	.693	1.444

Sumber: Data diolah SPSS, 2026

Berdasarkan tabel 5 hasil uji multikolinieritas, menunjukkan bahwa nilai VIF dari pendapatan asli daerah (X<sub>1</sub>) adalah 1,391, dana perimbangan (X<sub>2</sub>) adalah 1.062, dan belanja modal (X<sub>3</sub>) 1,444 Sedangkan nilai *tolerance* dari pendapatan asli daerah (X<sub>1</sub>) adalah 0,719, dana perimbangan (X<sub>2</sub>) adalah 0,941, dan belanja modal (X<sub>3</sub>) adalah 0,693. Dapat disimpulkan bahwa variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, dan X<sub>3</sub> menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10, dan nilai *tolerance* berada diatas 0,1, jadi hasil analisis menunjukkan tidak terjadinya masalah multikolinieritas, yang berarti model regresi penelitian adalah baik

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang mengandung homokedastisitas, karena dapat menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot*, yaitu sebagai berikut:



**Gambar 1 Hasil Uji Heterokedastisitas**

Sumber: Data diolah SPSS, 2026

Berdasarkan gambar 1 hasil analisis uji heteroskedastisitas, menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak adanya indikasi terjadinya heteroskedastisitas atau mengandung homokedastisitas, yang berarti model regresi penelitian ini adalah baik.

4) Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan metode *Durbin Watson (DW-test)*. Adapun hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.660 <sup>a</sup>	.435	.401		2.10618	2.079

Sumber: Data diolah SPSS, 2026

Berdasarkan tabel 6 hasil uji autokorelasi pada tabel menunjukkan bahwa nilai DW sebesar dengan observasi sebanyak 54 (n=54) dan jumlah variabel independent sebanyak 3 (k=3) diperoleh nilai d1 = 1,44 dan du = 1.68. Jadi  $du < DW < 4-du$  ( $1.68 < 2.079 < (4-1,68=2,32)$ ) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi, artinya persamaan regresi terpenuhi dan mengakibatkan hasil yang baik dapat terpenuhi.

**2. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	114.812	84.246		1.363	.179
	X <sub>1</sub>	109.825	32.182	.428	3.413	.001
	X <sub>2</sub>	-327.302	113.717	-.315	-2.878	.006
	X <sub>3</sub>	50.432	43.320	.149	1.164	.250

Sumber: Data diolah SPSS, 2026

Berdasarkan tabel 4.4 persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e \dots \dots \dots (2)$$

$$Y = 114.812 + 109.825 X_1 - 327.302 X_2 + 50.432 X_3 + e \dots \dots \dots (3)$$

Persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut.

- a) Nilai konstanta sebesar 114.812 menyatakan bahwa apabila variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ), dana perimbangan ( $X_2$ ) dan belanja modal ( $X_3$ ), sama dengan nol, maka kinerja keuangan ( $Y$ ) adalah sebesar 114.812 satuan.
- b) Nilai koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) mempunyai nilai positif sebesar 109,825 menunjukkan bahwa apabila variabel pendapata asli daerah meningkat sebesar 1 satuan maka variabel kinerja keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 109,825 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.
- c) Nilai koefisien regresi variabel dana perimbangan ( $X_2$ ) mempunyai nilai negatif sebesar  $- 327.302$  menunjukkan bahwa apabila variabel dana perimbangan meningkat sebesar 1 satuan maka variabel kinerja keuangan akan mengalami penurunan sebesar  $- 327.302$  satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.
- d) Nilai koefisien regresi variabel belanja modal ( $X_3$ ) mempunyai nilai positif sebesar 50.432 menunjukkan bahwa apabila variabel belanja modal meningkat sebesar 1 satuan maka variabel kinerja keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 50.432 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.

### 3. Uji Kelayakan Model (uji F)

Uji kelayakan model atau F test menghasilkan nilai F hitung dengan tingkat signifikansi tertentu (Ghozali, 2016). Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat pada hasil regresi yang dilakukan dengan program SPSS, yaitu jika nilai signifikansi  $F \leq 0,05$  berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, maka model regresi layak digunakan. Berdasarkan hasil pengolahan data maka hasil analisis uji kelayakan model (uji F) disajikan pada tabel 8 sebagai berikut:

**Tabel 8. Hasil Uji Model**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	170.803	3	56.934	12.835	.000 <sup>b</sup>
	Residual	221.799	50	4.436		
	Total	392.602	53			

Sumber: Data diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil Uji signifikan simultan (Uji F) pada tabel 8, diperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 hal ini mengindikasikan bahwa bahwa model regresi yang diestimasi dalam penelitian ini adalah dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Atau dengan kata lain model penelitian ini dianggap layak uji serta pengujian hipotesis dapat dilanjutkan.

### 4. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis (uji t) dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t yang akan dibandingkan dengan batas signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat dan jika tingkat signifikansi  $\leq 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Artinya variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji signifikansi yang dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9. Hasil Uji Parsial (t-test)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	114.812	84.246		1.363	.179
	$X_1$	109.825	32.182	.428	3.413	.001
	$X_2$	-327.302	113.717	-.315	-2.878	.006

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7877>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

$X_3$	50.432	43.320	.149	1.164	.250
-------	--------	--------	------	-------	------

Sumber: Data diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil Uji parsial (Uji statistik t) maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hasil analisis variabel pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan diperoleh nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 109.852 dan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini menegaskan bahwa variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y) pemerintah kabupaten kota di provinsi Bali.
- 2) Hasil analisis variabel dana perimbangan terhadap kinerja keuangan diperoleh nilai koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -327.302 dan nilai signifikansi sebesar  $0,006 < 0,05$  menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Hal ini menegaskan bahwa variabel dana perimbangan ( $X_2$ ) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (Y) pemerintah kabupaten kota di provinsi Bali.

Hasil analisis variabel belanja modal terhadap kinerja keuangan diperoleh nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 50.432 dan nilai signifikansi sebesar  $0,250 > 0,05$  menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Hal ini menegaskan bahwa variabel belanja modal ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (Y) pemerintah kabupaten kota di provinsi Bali.

### Pengujian Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui presentase besarnya pengaruh variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*). Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*) dilihat dari *Adjusted R Square*, pemilihan nilai ini dikarenakan penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan jumlah variabel bebas (*independen*) lebih dari satu. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Berikut hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 10:

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	DurbinWatson
1	.660 <sup>a</sup>	.435	.401		2.10618	2.079

Sumber: Data diolah SPSS, 2026

Berdasarkan tabel 10, nilai *Adjust R Square* sebesar 0,435 Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ), dana perimbangan ( $X_2$ ) dan belanja modal ( $X_3$ ) dapat menjelaskan variabel kinerja keuangan (Y) sebesar 43.5%, sedangkan sisanya sebesar 56.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah penduduk, belanja operasional dan lain sebagainya.

### Pembahasan dan Penyajian Hasil Analisis Data

#### 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memperoleh t hitung sebesar 3.413 dan t tabel 1.675 dengan tingkat signifikannya sebesar 0.001 karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan, yang berarti hipotesis pertama yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diterima.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan yang bersih yang berhak diakui pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam hal mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah maka menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan optimalisasi potensi dan sumber pendapatan suatu daerah tersebut sehingga akan memaksimalkan penerimaan pemerintahan daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

Hasil pada penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian dari Multi (2022) pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah berkontribusi terhadap APBD, karena semakin tinggi pendapatan daerah yang dihasilkan maka kinerja keuangan pemerintah daerah dianggap mampu dalam membangun daerahnya sendiri dan memungkinkan daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan kegiatan daerah tanpa bergantung kepada pemerintah pusat. Hal ini selaras dengan penelitian Era (2023) dimana pendapatan asli daerah dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah, dan menjadi faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong peningkatan investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong peningkatan perbaikan infrastruktur daerah.

## 2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan memperoleh t hitung sebesar -2.878 dan t tabel 1.675 dengan tingkat signifikannya sebesar 0.006 karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka variabel dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, yang berarti hipotesis kedua yang menyatakan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat diterima.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana alokasi bago hasil memiliki peran penting dalam keuangan daerah. Dana perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah, maka akan terjadi defisit anggaran. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah pusat menyalurkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat masih sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dana perimbangan menjadi salah satu sumber penting dalam mempercepat pembangunan daerah.

Hasil pada penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian dari Yoga (2021) dana perimbangan daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi atau dana perimbangan agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Oleh karena itu dengan adanya dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun disisi lain, hal ini dapat pula menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat tersebut tinggi, sehingga kemandirian suatu daerah tersebut menurun. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing. Hal ini selaras dengan penelitian Putri (2023) semakin tinggi ketergantungan daerah pada transfer pusat, kinerja keuangan cenderung menurun karena berkurangnya kemandirian fiskal, rendahnya motivasi menggali potensi pendapatan asli daerah, dan ketidakefisienan dalam pengelolaan belanja daerah.

## 3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa variabel belanja modal memperoleh t hitung sebesar 1.164 dan t tabel 1.675 dengan tingkat signifikannya sebesar 0.250 karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05, maka variabel belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan, yang berarti hipotesis pertama yang menyatakan belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat diterima.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengelolaan belanja modal yang baik dari segi seorang manajer di suatu entitas pemerintahan di daerah yaitu kepala daerah harus paham betul asas yang berlaku serta ukuran kinerja untuk menilai keberhasilan setiap kegiatan yang dikelola secara tertib, taat peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Ada pun ukuran keberhasilan dari segi belanja modal ada lima tepat, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tetap sasaran, dan tetap harga. Sehingga banyaknya dana yang dialokasikan untuk belanja modal maka nantinya dapat mewujudkan terciptanya infrastruktur dan sarana yang semakin baik dan tepat.

Hasil pada penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian dari Yoga (2021) tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat semakin tinggi dan terjadi peningkatan kesejahteraan. Sementara itu apabila semakin banyak pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah maka nantinya dapat pula meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian belanja modal secara tepat dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga

dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pengalokasian yang lebih banyak pada belanja modal nantinya dapat membantu masyarakat dalam pembangunan dan juga diharapkan diperolehnya sumber-sumber keuangan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini selaras dengan penelitian Novita (2022) belanja modal memiliki keterkaitan yang kuat terhadap kinerja keuangan daerah, hal ini dikarenakan pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun dan hal tersebut akan berjalan apabila keuangan daerah juga berjalan dengan lancar, demikian juga yang terjadi apabila semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan melibatkan populasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan mengumpulkan data dokumentasi dengan cara pengamatan atas dokumen-dokumen atau catatan yang dihasilkan oleh pihak lain yang terkait dengan penelitian ini seperti mencatat, mengutip dan mengumpulkan data dari dokumen. Analisis data digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan informasi dari pengujian di atas, dapat disimpulkan: 1). Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 2). Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 3). Belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

#### Referensi

1. Anisa Aulia Febrianti. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. <https://6207-Article Text-20194-1-10-20250424.pdf>
2. As-Siddiq, M. H. (2022). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Masa Pandemi Covid di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Asdaf Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. <https://eprints.ipdn.ac.id/10482/1/F2-Kuangan%20Publik-29.1396-Mohammad%20Hasbi%20As-Siddiq.pdf>
3. Bali, S. K. (2024). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2022-2023. Bali: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
4. Cyntia Angel Meisy Purba, D. S. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Di Provinsi Sumatera Utara. Ekonomi Pembangunan FEB Unsrat. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/64159>.
5. Fadilatul Saidah, M. M. (2024). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan. Universitas Islam Malang. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/25103/18904>
6. Fransisca dyah angraini, F. R. (2024). Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia .
7. Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
8. Gudono. (2017). Teori Organisasi Edisi 4. Yogyakarta: Andi.
9. Helti Handriani. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Danaperimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab. Pasaman Barat. Universitas Negeri Padang. [https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/7225/5183/?\\_\\_cf\\_ch1\\_tk=0haRMSurVu.IHEqWUfb\\_VW.0JWWb1PESQcCo d3Y3BXY-1774537739-1.0.1.1-elbGLP0WHXLjd.N94um6ZHW.9hy9VMEGD6P\\_3Hf0dI](https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/7225/5183/?__cf_ch1_tk=0haRMSurVu.IHEqWUfb_VW.0JWWb1PESQcCo d3Y3BXY-1774537739-1.0.1.1-elbGLP0WHXLjd.N94um6ZHW.9hy9VMEGD6P_3Hf0dI)
10. <https://bali.bps.go.id>
11. <https://djpk.kemenkue.go.id>
12. Iryanie, E. & Wulandari, P. A., (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Deepublish.
13. Ika Jatnika, D. S. (2024). Membangun Kemandirian Keuangan Daerah: Kasus Pendapatan Asli dan Belanja Modal Pemda Purwakarta. Jawa Barat : CV Mega Press Nusantara.
14. Karso, Junaedi. (2021). Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia. Cirebon: Insania
15. Magfira, A. F. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011-2020. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/22394/1/90300117045%20AYU%20FITRIAH%20MAGFIRA.pdf>
16. Muhsin Efendi, S. M. (2022). Kewenangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bener Meriah. Jawa Timur : CV Penerbit Qiara Media.
17. Muslimin, A. F. (2022). Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah . Universitas Pembangunan Nasional Veteran. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49475>
18. Nasution, A. P. (2020). Strategi Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu. <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/2170>
19. Niswani, N. (2024). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. Universitas Malikussaleh. <https://ojs.unimal.ac.id/jam/article/view/6367>
20. Nofa Angraini, T. H. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit/article/view/737>
21. Putri, E. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur . Universitas Brawijaya. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3266>

22. Rahmadina, S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Jawa Timur Tahun Periode 2017-2021. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49475>
23. Siregar, B. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Unit Penerbit.
24. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
25. Veron Walcer Euaggelyon Ratu, J. B. (2023). Analisis Komprasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan Non Kepulauan Di Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/50143/44025>
26. Yoga, I. M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Provinsi Bali. Universitas Warmadewa. [https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/8510/2/RAMA\\_62301\\_1915644069\\_0810099101\\_0817039103\\_part.pdf](https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/8510/2/RAMA_62301_1915644069_0810099101_0817039103_part.pdf)